IMPLEMENTASI PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU TENAGA KERJA MANDIRI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

¹ Aldira Maulana Ramadhan, ² Febri Yuliani

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

aldiramaulana1@gmail.com

Pekanbaru, Riau, Indonesia

Abstract

This study aims to see implementation of the independent workforce new entrepreneur creation program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City and the factors that support the implementation of the program. The research method used is descriptive qualitative method and uses policy implementation theory according to van Metter and Van Horn which consists of several indicators that affect the performance of public policy implementation, namely policy standards and objectives, resources, communication between organizations and implementing activities, characteristics of implementing agencies and social, economic and political conditions. The results of this study are the finding of several deficiencies that are of concern to be fixed, namely the aspects of time resources, coordination and socialization so that the implementation of the program has not run optimally in Tenayan Raya District, Pekanbaru City. Researchers also found several supporting factors in the implementation of this program in Tenayan Raya District including policy objectives, human resources, financial resources, facilities and infrastructure resources, economic conditions, implementor response and community participation. Researchers provide suggestions so that the availability of time resources, coordination and socialization of the implementing agencies can be improved so that in the future the implementation of this program can run optimally.

Keywords: Creation; Implementation; Independent Workforce; New Entrepreneur; Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi program penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan faktor yang mendukung pengimplementasian program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teori implementasi kebijakan menurut van Metter dan Van Horn yang terdiri dari beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya beberapa kekurangan yang menjadi perhatian untuk diperbaiki yakni pada aspek sumber daya waktu, koordinasi dan sosialisasi sehingga implementasi program tersebut belum berjalan secara maksimal di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Peneliti juga menemukan beberapa faktor pendukung dalam pengimplementasian program ini di Kecamatan Tenayan Raya diantaranya adalah tujuan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi, respon implementor dan partisipasi masyarakat. Peneliti memberikan saran agar ketersediaan sumber daya waktu, koordinasi dan sosialisasi dari para agen pelaksana agar dapat lebih ditingkatkan sehingga kedepannya implementasi program ini dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi; Penciptaan; Program; Tenaga Kerja Mandiri; Wirausaha baru

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengangguran sendiri dianggap sebagai salah satu penghambat berkembangnya suatu negara dimana Indonesia sendiri masih termasuk dalam negara yang berupaya untuk menekan persoalan sosial tersebut. Tingkat pengangguran dikalangan masyarakat dapat dikatakan masih cukup besar walaupun menurut lembaga statistik negara selalu disebutkan ada tren penurunan dari tahun ke tahun. Merujuk pada data BPS pada Agustus 2019, banyak penduduk pengangguran di Indonesia mencapai 5,28 persen (setara 7,05 juta penduduk), berkurang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2018 sebanyak 5,34 persen (seimbang dengan 7 juta penduduk). Persentase tingkat pengangguran di wilayah kota di bulan Agustus 2018 sebanyak 6,45 persen, menurun di 6,31 persen di bulan Agustus 2019. Kemudian disisi lain, persentase tingkat pengangguran di wilayah desa menurun dari 4,04 persen pada Agustus 2018 menjadi 3,93 persen di bulan Agustus 2019.

Mencermati berbagai data tingkat pengangguran diatas, dapat disadari bahwa pengangguran adalah persoalan besar dan tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat yang oleh karena itu untuk menyelesaikannya perlu dilaksanakan dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan bersama-sama dan terpadu antar lintas bagian dan masyarakat melalui cara berusaha untuk membuka lapangan kerja baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja. Aturan pemerintah untuk membangun ketenagakerjaan dengan jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan wujud penerapan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Dalam rangka upaya menekan persoalan kesejahteraan sosial, terkhususnya pengangguran, maka pemerintah Indonesia melahirkan bermacam program untuk menekan angka pengangguran dengan jalan membuka dan meluaskan peluang kerja yang produktif dan terus menerus dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Salah satu program berdasar pada perluasan kesempatan kerja dari pemerintah yaitu Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri. Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan melahirkan program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri.

Aktivitas perluasan kelompok kerja rentan atau penganggur dijalankan dengan mengkolaborasikan kegiatan Wirausaha Baru melalui Tenaga Kerja Mandiri dengan Pendampingan Kewirausahaan. Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri adalah program untuk membuka lapangan kerja atau untuk menciptakan usaha kepada golongan kerja muda terkhususnya penganggur atau semi penganggur agar nantinya

dapat dibimbing dan dilatih sehingga menjadi kelompok-kelompok pengusaha baru atau pebisnis muda yang mampu berusaha sendiri, berkembang terus menerus dan aktif dengan cara menguatkan bagian pendampingan yang memberdayakan dari tenaga pendamping atau pembimbing kelompok usaha.

Menurut Sumodiningrat (dalam Joni, 2013:16) menjelaskan pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) merupakan konsep dan agenda pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kapasitas adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri di bidang ekonomi, pendidikan, atau industri.

Program ini adalah program yang dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai wujud realisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja"*.

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan yang menerima program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri pada tahun 2019. Kecamatan Tenayan Raya sendiri merupakan kecamatan terluas di Kota Pekanbaru dan memiliki 13 kelurahan. Dari 13 kelurahan tersebut, terdapat 3 kelurahan yang menerima program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri pada tahun 2019 yakni diantaranya Kelurahan Pematang Kapau, Kelurahan Mentangor, dan Kelurahan Tangkerang Timur. Terpilihnya beberapa kelurahan tersebut karena sebelumnya telah dilakukan identifikasi lokasi dan seleksi peserta oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru bersama dengan petugas Kementerian Ketenagakerjaan.

Jenis-jenis kegiatan yang dijalankan oleh 3 kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya ini berbeda-beda. Masing-masing daerah tersebut secara berurutan mengikuti jenis pembekalan kewirausahaan yang berbeda-beda, mulai dari usaha catering, pembuatan kue basah dan kering sampai dengan usaha barbershop. Dalam setiap kelompok terdiri dari 20 orang yang diketuai oleh 1 orang. Pembekalan kewirausahaan tersebut berlangsung selama 3 hari yang mana pembagiannya pada hari ke-1 berupa pemberian pengetahuan, sedangkan pada hari ke-2 dan ke-3 berupa pemberian keterampilan teknis. Total jam pembelajaran pembekalan yang dilaksanakan selama 3 hari berjumlah 24 jam.

Adapun masalah yang terjadi pada pelaksanaan program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri pada tahun 2019 yakni pertama, durasi kegiatan pendampingan yang diterima oleh masing-masing kelompok Tenaga Kerja Mandiri berbeda-beda.

Permasalahan yang kedua, baik pihak Kelurahan maupun Kecamatan tidak mengetahui secara jelas program Tenaga Kerja Mandiri yang berjalan di daerahnya masing-masing. Permasalahan yang ketiga, komunikasi yang berjalan antara Tenaga Pendamping dengan kelompok Tenaga Kerja Mandiri kurang intensif, padahal Tenaga Pendamping sendiri mempunyai peran penting di dalam program ini yaitu membimbing dan membantu kelompok Tenaga Kerja Mandiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Penelitian ini sendiri mencoba untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan merujuk kepada penggunaan teori Van Meter & Van Horn dan menemukan faktor-faktor yang mendukung implementasi program tersebut. Dalam (Agustino, 2020 : 151-153) menurut van Metter dan van Horn, terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan publik yaitu: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik pelaksana; kondisi ekonomi, sosial dan politik; disposisi atau sikap pelaksana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang mendukungnya. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan perluasan bagi disiplin ilmu Administrasi Publik terkhususnya di bidang kebijakan publik dan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan saran bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian selanjutnya serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti terhadap implementasi program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan filosofi post-positivisme yang dipakai dalam melihat situasi objek alam (sebagai lawan dari uji coba), yang mana peneliti adalah alat kuncinya, dan perolehan sampel dengan cara purposive atau snowball, sementara teknik pengumpulan data melalui cara triangulasi (gabungan). Diseksi (kombinasi) analisis data mempunyai sifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada arti daripada men-generalisasi.

Pada penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni data yang didapatkan dan dikumpulkan dari narasumber baik secara lisan dan tertulis digabungkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat atau naratif. Selain itu penelitian ini masih bersifat penelitian lapangan, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati, mewawancarai dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

Lokasi penelitian merupakan wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan supaya peneliti mampu memahami bagaimana situasi yang senyatanya kepada apa yang akan diteliti. Pada penelitian ini tempat yang dipilih dalam penelitian yaitu Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, penunjukan informan sebagai sumber data ditentukan melalui cara menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut (Moleong, 2018), informan didefinisikan sebagai pihak yang pada umumnya memberikan informasi mengenai situasi penelitian dan keadaan latar belakang, serta benar-benar mengetahui persoalan yang akan diteliti. Sedangkan menurut (Bungin, 2011), informan merupakan orang yang diwawancarai oleh pewawancara atau diminta memberikan informasi dianggap telah memahami dan memahami data, informasi atau fakta yang dibutuhkan oleh objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dijalankan ketika mengumpulkan data dan setelah mengumpulkan data selesai pada waktu khusus. Penelitian ini memakai teknik analisis data model Miles & Huberman, dimana pengolahan datanya meliputi beberapa bagian diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program yang dibuat sebagai wujud realisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 pasal 8 ayat (2). Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri merupakan program untuk membuka lapangan kerja atau untuk menciptakan usaha kepada golongan kerja muda terkhususnya penganggur atau semi penganggur agar nantinya dapat dibimbing dan dilatih sehingga menjadi kelompok-kelompok pengusaha baru atau pebisnis muda yang mampu berusaha sendiri, berkembang terus menerus dan aktif dengan cara menguatkan bagian pendampingan yang memberdayakan oleh tenaga pendamping atau pembimbing kelompok usaha.

Pembahasan yang disajikan merupakan hasil dari pengolahan data dan penemuan lapangan yang peneliti jalankan dengan penggunaan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan van Horn (1975) yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Dalam teori itu terdapat 6 indikator yang dianggap mempengaruhi kinerja kebijakan publik yakni diantaranya Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, serta Disposisi (Sikap Pelaksana). Berikut

penjabaran analisisnya:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan adalah aspek penting untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau program. Program atau kebijakan yang dibuat tentunya perlu ada tujuan yang jelas dan spesifik sehingga demikian dapat terhindar dari adanya konflik atau persepsi yang berbenturan diantara para implementor kebijakan. Adanya kejelasan standar dan tujuan kebijakan dapat menjadi alat ukur dalam menentukan apakah suatu kebijakan atau program berhasil diimplementasikan atau tidak. Kemudian hal penting yang juga perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan standar dan tujuan kebijakan haruslah sesuai dengan sosio-kultur dan bersifat realistis pada tingkat pelaksana/implementor sebab kondisi tersebut juga membawa pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penganggur maupun setengah penganggur dengan cara memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana sehingga setelah pelatihan mereka dapat melanjutkan usaha berkelompok serta nantinya diharapkan dengan berwirausaha dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

Standar keberhasilan dari program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri secara teknis adalah usaha yang berkelanjutan. Pelatihan dan pembekalan yang diberikan semata-mata diharapkan tidak hanya menumbuhkan motivasi masyarakat pada saat itu saja, namun juga setelahnya tetap berkeinginan kuat untuk melanjutkan usaha mereka secara berkelompok. Pengetahuan dan ilmu praktek yang mereka peroleh selama pelatihan merupakan modal awal untuk mereka dapat mengembangkan usahanya sehingga nantinya dapat membawa dampak terhadap peningkatan perekonomian keluarganya.

2. Sumber Daya

Berhasil atau tidaknya penerapan strategi atau prosedur tidak lepas dari bagaimana sumber daya yang dimiliki digunakan. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya terpenting dan berpengaruh bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Selama proses pelaksanaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul selaras dengan persyaratan kerja yang ditetapkan dalam peraturan tertulis. Namun demikian, keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan tidak cuma bergantung pada sumber daya manusia, namun juga pada sumber daya lain, seperti sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya waktu yang juga berperan dan berpengaruh penting.

Dalam implementasi program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berperan sebagai *leading sector* pelaksana. Adapun pihak-pihak lain yang juga berperan sebagai implementor di dalam program ini diantaranya

adalah Pekanbaru Hospitality Institute dan Tenaga Pendamping (Tenaga Kerja Sukarela). Berkaitan dengan sumber daya manusia yang tersedia dari masing-masing implementor sudah memadai dalam menjalankan program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya. Hal tersebut juga terbukti dari adanya pernyataan yang mendukung dari salah seorang peserta Tenaga Kerja Mandiri di Kelurahan Pematang Kapau.

Anggaran yang digunakan untuk menjalankan program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan. Anggaran yang dikeluarkan tersebut kemudian digunakan untuk membeli sarana prasarana dalam rangka mendukung usaha bagi kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang diberdayakan.

Bantuan sarana prasarana usaha yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru kepada kelompok Tenaga Kerja Mandiri sudah cukup memadai. Adapun berbedanya alat-alat yang diberikan disebabkan karena jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing kelompok pun berbeda-beda. Sarana dan prasarana yang diberikan tersebut merupakan sebagai penunjang agar kelompok usaha mereka dapat berkembang dan produktif.

Pelaksanaan kegiatan berjalan selama 3 hari di masing-masing Kelurahan penerima program. Dalam pelatihan tersebut peserta Tenaga Kerja Mandiri diberikan teori dan praktek dengan alokasi waktu yang telah disusun. Namun pada kenyataannya, pelatihan yang dilakukan selama 3 hari ini masih dirasa kurang bagi masyarakat. Terlebih lagi untuk praktek sebaiknya memerlukan waktu yang lebih panjang agar peserta benar benar ahli di dalam usaha yang dijalankannya.

Waktu untuk kegiatan pendampingan yang terjadwal adalah selama 5 bulan. Namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa waktu kegiatan pendampingan tidak secara merata berjalan selama 5 bulan untuk seluruh kelurahan atau untuk seluruh jenis kegiatan usaha. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berbedanya jadwal pelatihan yang didapatkan antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya sehingga mempengaruhi lama waktu kegiatan pendampingan. Dengan demikian, kelurahan yang mendapatkan pelatihan lebih cepat tentunya akan mendapatkan waktu kegiatan pendampingan yang lebih lama dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang belum mendapatkan pelatihan. Waktu yang tidak merata dan sedikit menyebabkan kegiatan pendampingan menjadi tidak maksimal.

3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Aspek komunikasi berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan proses penciptaan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru. Jika pengambil keputusan atau

pembuat kebijakan tahu apa yang akan mereka lakukan, maka penerapannya akan efektif. Jika pelaksana memahami kebijakan komunikasi yang baik, maka implementasi akan berhasil. Dengan demikian, harus dilaksanakan komunikasi yang handal agar maksud dan tujuan kebijakan dapat dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana di tingkat bawah.

Koordinasi yang dibangun antara pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan Kecamatan dan beberapa Kelurahan penerima program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri tidak berjalan secara baik sebab hanya dilibatkan pada saat mencari peserta dan pembukaan program, sedangkan pada saat pelatihannya sendiri baik Kecamatan maupun Kelurahan tidak lagi dilibatkan sehingga pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak mengetahui bagaimana jalannya proses pelatihan dan sarana prasarana apa saja yang diberikan kepada kelompok Tenaga Kerja Mandiri.

Komunikasi yang dibangun setelah pelatihan tidak berjalan secara baik dan intensif. Koordinasi yang berjalan antara Tenaga Pendamping dan kelompok Tenaga Kerja Mandiri hanya sekedarnya saja dan hanya berkomunikasi melalui media telfon. Sedangkan, inti dari kegiatan pendampingan yang sebenarnya adalah setelah pelatihan berkaitan dengan bagaimana kegiatan pendampingan tersebut mendorong dan memotivasi kelompok Tenaga Kerja Mandiri agar mampu secara maksimal mengembangkan usahanya dengan jalan berkomunikasi secara intensif dan turun langsung melihat perkembangan kelompok usaha Tenaga Kerja Mandiri.

Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana program. Adapun informasi yang diberikan hanya melalui surat yang ditujukan kepada masing-masing kelurahan untuk mencari peserta yang memiliki minat dan bakat berwirausaha. Kemudian informasi yang minim tersebut disampaikan kepada masyarakat oleh pihak kelurahan pada saat mencari calon peserta Tenaga Kerja Mandiri. Melihat cara sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri, peneliti merasa sangat minim yakni hanya melalui surat saja, namun tidak menyampaikannya secara langsung dengan melakukan penyuluhan untuk menjelaskan maksud dan tujuan program tersebut.

4. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri tertentu ataupun sifat khusus yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi kebijakan publik tidak dapat terlepas dari seperti apa karakteristik pelaksananya. Dalam model teori Van Metter dan van Horn (1975), keberhasilan sebuah proses pelaksanaan kebijakan mampu diukur dari karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dalam aktor pelaksana. Karakteristik implementor berkaitan dengan bagaimana para implementor kebijakan turut serta dalam mewujudkan keberhasilan implementasi sesuai dengan maksud dan tujuan yang diisyaratkan didalam kebijakan. Adapun didalam indikator karakteristik pelaksana ini,

dapat dinilai berbagai unsur yang terkait didalamnya diantaranya adalah karakteristik agen pelaksana, *Standard Operating Procedure (SOP)*, dan sanksi.

Masing-masing pelaksana mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan keberhasilan implementasi program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berperan sebagai pelaksana utama program, kemudian Pekanbaru Hospitality Institute berperan sebagai instruktur atau pelatih, sedangkan Tenaga Pendamping berperan mendampingi kelompok Tenaga Kerja Mandiri baik pada saat pelatihan maupun setelah pelatihan. Selain ketiga implementor diatas, Kelurahan berperan membantu Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk mencari calon peserta Tenaga Kerja Mandiri yang memiliki minat dan bakat berwirausaha untuk nantinya diberi pelatihan dan bantuan sarana prasarana usaha.

Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2019 dimulai dengan pengiriman surat kepada Kelurahan/Kecamatan untuk mencarikan calon peserta TKM yang memiliki minat dan bakat untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan. Setelah data calon peserta TKM diterima, selanjutnya diadakan identifikasi lokasi guna mengumpulkan informasi dan data terkait potensi sumber daya dari calon penerima program tenaga kerja mandiri berlandaskan masukan masyarakat. Kemudian diadakan seleksi peserta untuk menghimpun data dan informasi masyarakat yang sesuai dengan kriteria peserta.

Setelah hasil seleksi peserta diperoleh, selanjutnya ditetapkan jenis usaha berdasarkan hasil identifikasi lokasi sebelumnya. Selanjutnya diadakan pelatihan/pembekalan kewirausahaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada para peserta TKM berdasarkan jenis usaha yang ditetapkan sebelumnya. Setelah kegiatan pelatihan selesai, maka masing-masing kelompok TKM akan diberikan sarana prasarana usaha guna menunjang kegiatan usahanya. Pada tahap akhir merupakan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk mendampingi kelompok TKM dalam menjalankan usahanya dan membantu menyelesaikan persoalan yang sewaktu-waktu terjadi.

Sanksi yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai pelaksana utama program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri cukup tegas dan berat yaitu bisa mendapatkan blacklist sampai dengan 5 tahun serta tidak mendapatkan dana jika tidak melaksanakan program tersebut dengan tepat waktu. Sementara itu, sanksi yang diterima untuk Tenaga Pendamping juga cukup tegas yakni gaji tidak akan diberikan jika adanya pemalsuan laporan. Aspek sanksi sendiri sudah cukup tegas dan berat sehingga menuntut para pelaksana berupaya semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan maksud dan tujuan kebijakan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Aspek sosial, ekonomi dan politik adalah lingkungan eksternal yang terletak diluar organisasi yang mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Lingkungan eksternal bersifat dinamis yang artinya memiliki pergerakan yang berubah-ubah. Adanya pergerakan dinamis ini menyebabkan pengaruh-pengaruh yang datang sulit untuk terprediksikan. Dengan demikian maka aspek ini juga perlu untuk diperhatikan sebab turut serta memberikan pengaruh kepada keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan. Dalam model Van Metter dan van Horn (1975), pengaruh lingkungan eksternal mampu diamati dari sejauhmana lingkungan eksternal itu sendiri ikut serta mendukung keberhasilan kebijakan publik yang diimplementasikan.

Kondisi sosial yang ada di Kecamatan Tenayan Raya menunjukkan bahwa program pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi dengan kondisi wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebagai kecamatan terluas maka tidak salah jika kecamatan ini mendapat prioritas di dalam program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya masih berada pada tingkat menengah, bahkan ada yang menengah ke bawah. Kondisi tersebut dibuktikan dengan data masih banyaknya masyarakat miskin yang menerima bantuan. Dengan begitu maka tepat jika Kecamatan Tenayan Raya termasuk kecamatan yang diprioritaskan dan diperhatikan dalam program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini.

Pengaruh politik dalam program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini terletak pada pengajuan anggaran. Sebagaimana yang diketahui bahwa anggaran dalam program ini merupakan perhal yang sangat krusial sebab anggaran yang diluncurkan nantinya digunakan untuk menyediakan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan usaha kelompok Tenaga Kerja Mandiri. Adapun sebelum anggaran diluncurkan, anggaran tersebut harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari DPR, termasuk juga dana tugas pembantuan.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanatkan sebagai pelaksana kebijakan haruslah dimiliki oleh para implementor. Keberhasilan proses implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh seperti apa sikap dan reaksi berbagai implementor terhadap kebijakan yang diturunkan. Setiap kebijakan atau program yang baik diturunkan hendaknya didukung secara penuh oleh para implementor atau pelaksana dibawah sehingga keberhasilan dan tujuan kebijakan dapat tercapai. Namun demikian, tujuan kebijakan atau program yang diturunkan sebaiknya juga harus sesuai dengan kondisi-kondisi agen pelaksana tingkat bawah sehingga tujuan kebijakan memungkinkan untuk dicapai.

Pemahaman implementor selaku pelaksana utama mengenai program Penciptaan

Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri cukup baik, terlihat dari adanya keinginan untuk dapat melaksanakan program dengan tepat waktu, tepat sasaran, merata serta berusaha untuk melaksanakan program tersebut secara maksimal agar terhindar dari sanksi yang bisa didapatkan jika pelaksanaan program tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Implementor yang berkaitan juga memiliki pemahaman yang cukup baik, terlihat dari pemahaman mereka mengenai maksud dan tujuan program serta mampu menjelaskan rangkaian proses mulai dari awal sampai dengan akhir program.

Masing-masing implementor sangat mendukung program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri. Sebab program ini memiliki maksud dan tujuan bagus yaitu untuk memberdayakan masyarakat dengan cara diberi pelatihan dan sarana prasarana usaha agar masyarakat dapat menjadi wirausahawan yang mandiri, produktif dan berkelanjutan sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Tujuan kebijakan. masing-masing implementor mempunyai persepsi yang serupa terkait dengan tujuan program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat penganggur maupun setengah penganggur dengan cara memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana sehingga setelah pelatihan mereka dapat melanjutkan usaha berkelompok serta nantinya diharapkan dengan berwirausaha dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Begitu juga dengan kelompok sasaran yang berpendapat bahwa program ini bertujuan demi meningkatkan kualitas dan memotivasi Sumber Daya Manusia yang ada supaya dapat produktif dan membuka usaha secara mandiri dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

Dengan adanya kesamaan persepsi tersebut tentunya menjadi pendorong agar keberhasilan program lebih mudah untuk dicapai sebab masing-masing implementor dan kelompok sasaran memiliki arah yang sama mengenai bagaimana program ini dijalankan dan apa tujuan akhir dari program tersebut.

Sumber Daya Manusia. Adapun jika dilihat mengenai sumber daya manusia yang tersedia oleh tiap-tiap implementor, dapat mengatakan bahwa masing-masingnya sudah mencukupi untuk menjalankan program tersebut, terlihat dari tidak adanya kendala atau keluhan dari masing-masing implementor. Dengan sudah memadainya sumber daya manusia yang tersedia oleh tiap-tiap implementor, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu aspek sumber daya manusia termasuk faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2019.

Sumber Daya Finansial. Mengenai sumber daya keuangan dalam melaksanakan

program tersebut berasal dari dana tugas pembantuan yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dana yang diluncurkan tersebut nantinya digunakan untuk menyediakan sarana prasarana usaha bagi kelompok Tenaga Kerja Mandiri. Sedangkan untuk Tenaga Pendamping sendiri direkrut dan dibiayai secara langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian mengenai pencairan anggaran dana tugas pembantuan juga dapat dikatakan cukup cepat yakni hanya membutuhkan selang waktu 1-2 hari saja, sehingga hal tersebut memberi pengaruh yang cukup baik terhadap kelancaran proses implementasi program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana. ketersediaan sarana prasarana baik yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan maupun terkait dengan sarana prasarana yang diberikan kepada kelompok Tenaga Kerja Mandiri dapat dikatakan cukup lengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan ungkapan dari berbagai peserta yang menerima sarana prasarana usaha tersebut. Adapun ketersediaan sarana prasarana usaha tersebut merupakan hal yang sangat penting karena sebagai penunjang bagi Kelompok Tenaga Kerja Mandiri agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dengan demikian dapat disimpulkan ketersediaan sarana prasarana membawa andil yang cukup besar bagi keberhasilan program.

Kondisi Ekonomi. program ini sebenarnya menitikberatkan perhatian kepada perbaikan ekonomi masyarakat dengan jalan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan berwirausaha dan pemberian sarana prasarana usaha. Dengan pelatihan dan pemberian sarana prasarana usaha tersebut, nantinya diharapkan dapat melahirkan jiwa-jiwa wirausahawan yang mandiri, produktif dan berkelanjutan yang kemudian dampak positifnya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat itu sendiri. Dikarenakan program ini memfokuskan perhatian terhadap ekonomi masyarakat, program ini mendapat tanggapan dan dukungan yang cukup positif terlihat dari partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

Respon Implementor. Masing-masing implementor sangat mendukung program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya ini. Dukungan penuh tersebut didapatkan karena program ini didasari atas tujuan yang baik yakni untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan berwirausaha dan pemberian sarana prasarana usaha. Adanya dukungan dari berbagai implementor ini tentunya membawa dampak yang cukup besar terhadap keberhasilan implementasi program ini.

Partisipasi Masyarakat. Perihal tersebut mampu diamati dari antusias dan semangat yang cukup tinggi dari para peserta Tenaga Kerja Mandiri pada saat kegiatan pelatihan terutama pada saat pelatihan prakteknya. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya cukup tinggi dalam program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri ini.

Adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi memberi gambaran bahwa program ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi masyarakat menganggur, setengah menganggur maupun masyarakat miskin.

KESIMPULAN

1. Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri yang dilaksanakan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki yakni pada aspek sumber daya waktu, koordinasi dan sosialisasi. Sumber daya waktu yang kurang memadai terletak pada kegiatan pelatihan dan kegiatan pendampingan. Pada kegiatan pelatihan, masyarakat merasa waktu pelatihan masih kurang yaitu hanya berjalan 3 hari saja sehingga ilmu yang dapat diserap pun tidak maksimal. Sedangkan pada kegiatan pendampingan, durasi waktu pendampingan yang diterima oleh masing-masing kelurahan berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakmerataan kegiatan pendampingan yang berdampak terhadap tidak maksimalnya kegiatan pendampingan.
2. Koordinasi yang dilakukan antara Disnaker dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak dapat dikatakan baik sebab baik Pihak Kelurahan maupun Kecamatan hanya dilibatkan pada saat pembukaan dan pencarian peserta saja, sedangkan pada saat kegiatan pelatihan tidak diikutsertakan. Selanjutnya koordinasi yang dilakukan antara Tenaga Pendamping dan kelompok Tenaga Kerja Mandiri setelah pelatihan juga tidak berjalan secara baik dan intensif. Kemudian juga tidak adanya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru seperti menyelenggarakan penyuluhan dan pertemuan secara langsung untuk masyarakat luas yang mana sebenarnya hal tersebut penting untuk dilakukan.
3. Faktor-Faktor yang mendukung Implementasi Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah tujuan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi, respon implementor dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi Ke-). Alfabeta.
- Budiasa, Anak Agung Gde Rai, A.A. Gede Raka, I Made Mardika. 2019. Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. 4(2): 71-82.
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In Kencana.
- Ditjen Binapenta dan PKK. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Padat Karya Infrastruktur dan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2019*.
- Herdiyana, Deni. 2019. Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*. 16(2): 176-188.
- Joni. (2013). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi pada Bank Sampah di Kelurahan Sei Jang Tahun 2014). In *Naskah Publikasi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Maritim Raja Haji*.
- Lamalaka, Moh. Andika. 2015. Implementasi Kebijakan Zero Poverty Program Padat Karya di Kota Palu. *e Jurnal Katalogis*. 3(9): 179-189.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 1(2): 87-99.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
- Rosdiana, Ayu Imade, Bambang Budi Raharjo, Sofwan Indarjo. 2017. Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). *HIGEIA*. 1(3): 140-150.
- Sasmito, Cahyo. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovation*. 3(2): 68-74.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Windiasih, R., Sulistiyono, A., Mardikanto, T., & Soemanto., R. (2014). Empowerment of the Prisoners (WBP) through a Partnership Model between Government and Private Actor (Case Study of Corporate Social Responsibility Program PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant in Nusakambangan). In *International Journal of Social Science Research*.